

BUNKER BANGUNAN PENINGGALAN JEPANG DI KABUPATEN ENREKANG PROPINSI SULAWESI SELATAN



KAAN
TARIAN
DAYA
SAR

AKASSAR



BALAI PELESTARIAN PENINGGALAN PURBAKALA
MAKASSAR TAHUN 2015

BUNKER
BANGUNAN PENINGGALAN JEPANG
DI KABUPATEN ENREKANG



PELESTARIAN BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA MAKASSAR SULAWESI SELATAN, SULAWESI TENGGARA DAN SULAWESI BARAT	
DIDAFTAR TGL	5-1-2016
NO. PENDAFTARAN	2.257.
NO. KLASIFIKASI	930.1

1 exp.

BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA MAKASSAR

2015

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga Album Purbakala ini dapat diselesaikan hingga sampai ke tangan pembaca sekalian.

Tim menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga tim dengan tangan terbuka mengharapkan masukan dan kritik yang sifatnya membangun dalam rangka penyempurnaannya ke depan.

Album Purbakala yang membahas tentang Bunker Jepang di Kabupaten Enrekang merupakan salah satu upaya untuk mempublikasikan obyek cagar budaya yang mana pelestariannya telah dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar, dengan tujuan untuk mempublikasikaninggalan purbakala khususnya bunker Jepang. Oleh karena itu, sasaran utama album ini adalah untuk menyajikan kondisi kekinian bunker tersebut yang ada di Kabupaten Enrekang.

Harapan kami, dengan diterbitkannya album ini dapat menjadi acuan dalam upaya pelestarian dan kajianinggalan purbakala Kabupaten Enrekang khususnya bunker.

Tim Kerja

SAMBUTAN

Syukur Alhamdulillah atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Album Purbakala yang menyajikan tentang Bunker-Bunker Pertahanan Jepang di Kabupaten Enrekang, dapat disajikan dalam bentuk buku yang sederhana.

Album Purbakala, merupakan suatu bentuk kemasan informasi tentang potensi kekayaan budaya bangsa dan sekaligus sebagai wadah publikasi dalam kerangka pelestarian cagar budaya.

Amanah UU No. 11 Tahun 2010 tentang Pelestarian Cagar Budaya dan pemanfaatan pembangunan kebudayaan sebagai urusan wajib pemerintah, harus diaplikasikan dalam berbagai bentuk kebijakan, sehingga nampak peran kebudayaan sebagai pengarah dalam pembangunan, baik pembangunan manusia maupun kaitannya dengan identitas kita sebagai bangsa.

Oleh karena itu saya menyambut upaya yang dilakukan oleh Tim, dalam rangka menyusun Album Purbakala khususnya Bunker Pertahanan Jepang di Kabupaten Enrekang. Semoga Album Purbakala ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Makassar, Mei 2015
Kepala,



Andi Muhammad Said, M.Hum
NIP. 19630112 199203 1 001

Penanggung Jawab :
Andi Muhammad Said

Redaktur :
Syahrawi Mannan

Editor :
Mohammad Natsir

Penulis :
Mohammad Natsir
Nurbiyah Abubakar
Djumiati

Fotografer :
Achmad Abdul

Disain Grafis :
Anzhar

DAFTAR ISI

PENGANTAR

SAMBUTAN

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN
2. PENDUDUKAN JEPANG
3. DESKRIPSI BUNKER JEPANG DI KABUPATEN ENREKANG

BUNKER JEPANG A

BUNKER JEPANG B

BUNKER JEPANG C

BUNKER JEPANG D

BUNKER JEPANG E

BUNKER JEPANG F

BUNKER JEPANG G

BUNKER JEPANG H

BUNKER JEPANG I

4. PENUTUP



PENDAHULUAN

Bunker adalah sejenis bangunan pertahanan militer dan dibangun di bawah tanah yang berfungsi sebagai gudang dan tempat perlindungan. Dalam masa Perang Dingin, bunker-bunker besar dibangun untuk mengantisipasi kemungkinan perang nuklir.

Kehadiran Bunker di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang tidak luput dari campur tangan pemerintah Jepang dalam menempatkan bunker-bunker tersebut ke tempat yang strategis. Seperti kita ketahui bahwa pusat dari segala kegiatan tentara Jepang adalah Anggeraja, karena daerah ini letaknya sangat strategis yakni pada posisi silang, yang dapat menghubungkan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.

PENDUDUKAN JEPANG

A. Pendudukan Jepang di Indonesia

Di masa-masa akhir pemerintahan Hindia Belanda, tahun 1942, ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan penentangan oleh rakyat. Gerakan penentangan oleh rakyat di Sulawesi Selatan, menyeluruh yang diakibatkan oleh pola pemerintahan dan kekuasaan yang dijalankannya. Sebuah kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh Edward L. Poelinggomang tentang Pemerintahan Hindia Belanda, bahwa Manipulasi mewarnai pelaksanaan pemerintahan Hindia Belanda, yang bertujuan untuk mempertahankan dominasi. Manipulasi itu pula yang kemudian memicu gerakan-gerakan rakyat, sebagai pernyataan penentangan terhadap manipulasi pemerintahan Hindia Belanda (Poelinggomang, 2004). Kondisi penentangan rakyat terhadap Pemerintahan Hindia Belanda tersebut, menempatkan posisi psikologi rakyat atas kedatangan Jepang pada awalnya seakan sebuah harapan baru.

Kondisi psikologi rakyat di atas, merupakan salah satu faktor yang sekaligus memperlemah kedudukan Pemerintah Hindia

Belanda, karena rakyat tidak bersedia membantu pemerintah, rakyat sangat benci kepada penjajah yang telah banyak menghisap keringat dan kekayaan Bumi Indonesia (Rahman, 1986). Itulah sebabnya, ketika pecah perang Dunia ke -II Nederland (Belanda) sebagai negara induk Hindia Belanda (Indonesia), beberapa saat terhapus dari peta bumi sebagai negara merdeka. Negara itu dikuasai oleh Jerman. Jepang dengan kekuatannya melawan Sekutu yang terdiri atas, Amerika, Inggris, Australia dan Belanda, mengadakan penyerbuan begitu besar. Bahkan disebutkan oleh Sukirman A. Rahman (1986), bahwa dalam jangka waktu singkat udara Indonesia dan Melayu telah dibersihkan oleh Angkatan Udara Jepang, dari pesawat-pesawat Inggris, Belanda, Australia dan Amerika.

Propaganda Jepang dalam perang dunia ke-II tersebut, untuk kemerdekaan bangsa-bangsa Asia dari penjajahan Barat dan untuk kemakmuran bersama di Asia Timur Raya, sangat luas mempengaruhi bangsa-bangsa Asia. Kepercayaan kepada

Jepang sebagai pengusir Kolonialisme Belanda besar sekali termasuk di Indonesia.

Penyerbuan Jepang dngan cepat sekali, sehingga dalam tempo yang amat singkat udara seluruh Indonesia dapat dikuasainya. Pangkalan laut Surabaya dan pangkalan udara Bandung menjadi sasarannya. Angkatan perang Jepang mendesak melalui selat-selat antara Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Irian untuk menyudahi perlawanan angkatan Laut Jawa. Lautan juga kemudian dikuasai.

Tempat-tempat strtategis terus direbut satu persatu sampai ke wilayah Indonesia Timur . Pendaratan pasukan Jepang mulai mendarat di Menado pada tanggal 11 Januari 1942, Lapangan terbang Kendari direbut pada tanggal 24 Januari 1942. Pada bulan Februari pengebompengebom Jepang yang berpangkalan di Kendari, menyerang kapal perang Amerika Serikat dan Belanda di daerah itu. Pangkalan Angkatan Perang Jepang di Kendari hingga kini, masih dapat disaksikan dari tinggalannya. Tinggalan-tinggalan itu, berupa bunker-bunker pertahanan serta

gudang-gudang senjata. Temuan berupa gudang senjata dan bunker ditemukan disekitar Bandara Kendari dan sebagian bunker pertahanan ditemukan di kota Kendari. Selanjutnya Ambon di duduki pada tanggal 3 Februari 1942 dan selanjutnya Angkatan Perang Timur Jepang mendarat di Makassar pada tanggal 9 Februari 1942 (Harvey, 1989).

Pendudukan Jepang di Wilayah Timur Indonesia

Setelah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Indonesia, Jepang mulai menanamkan sistem penjajahan menggantikan pemerintah Hindia Belanda. Penyerahan kekuasaan ini menandakan lemahnya Hindia Belanda yang tidak lebih dari mencari keuntungan saja di daerah jajahannya sedangkan pertahanannya sama sekali tidak diperhatikan, sehingga Hindia Belanda kalah oleh Jepang. Namun kemenangan Jepang itu tidak secara fisik saja karena keunggulan militer dan teknologinya, tetapi dibalik itu sebenarnya terdapat dorongan bangsa Indonesia sendiri yang bosan terhadap penjajahan Belanda, apalagi Jepang menggunakan propaganda yang

mampu menembus kebencian terhadap kolonialisme pada umumnya.

Pada tanggal 11 Januari 1942 pasukan Jepang pertama mendarat di wilayah timur yakni Manado Sulawesi Utara dan Tarakan Kalimantan Timur. Tanggal 24 Januari lapangan terbang Kendari Sulawesi Tenggara direbut dan pada tanggal 9 Februari Angkatan Perang Timur Jepang mendarat di Makassar (Harvey, 1989). Makassar menjadi markas besar Armada barat daya Angkatan Laut Jepang dan pusat pemerintahan sipil Angkatan Laut untuk Borneo, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil.

Pada bulan Februari pengebom-pengebom Jepang yang berpangkalan di Kendari, menyerang kapal perang Amerika Serikat dan Belanda di Daerah itu. Pangkalan Angkatan Perang Jepang di Kendari hingga kini, masih dapat disaksikan dari tinggalannya. Tinggalan-tinggalan itu, berupa bunker-bunker pertahanan serta gudang-gudang senjata. Data yang dihimpun oleh Balai Pelestarian Purbakala Makassar, membuktikan dimana

temuan-temuan itu tersebar di sekitar Lapangan terbang Kendari sekarang, dan sebagian bunker pertahanan berada di Kota Kendari (BP3 Makassar, 2003).

Kolonialisasi Jepang di wilayah Sulawesi Tenggara khususnya di daerah daratan, diawali oleh masuknya Jepang pada tahun 1942 di Kota Kendari. Di awal kedatangannya di Kendari, Jepang cenderung memfokuskan pada pembangunan sarana militer dan pertahanan. Hal ini dapat dilihat pada jenis tinggalan arkeologis dari periode kolonial Jepang yang didominasi pilboks, bunker, baterai dan gua alam. Selain itu juga terdapat sarana dan prasarana lain yang dibangun untuk mendukung proses kolonisasinya seperti struktur jembatan, struktur bangunan, sumur, kolam dan penampungan air. Tinggalan-tinggalan tersebut tersebar dalam wilayah kota Kendari dan Kawasan Pangkalan Udara TNI AU Wolter Monginsidi, Kabupaten Konawe Selatan.

Makassar sebagai Markas besar Armada Barat Daya Angkatan Laut Jepang, sekaligus sebagai pusat pemerintahan sipil untuk wilayah Borneo, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil, mengakibatkan pembangunan sarana pertahanan dan perkantoran mendapat perhatian yang cukup besar. Pembangunan sarana pertahanan di wilayah Makassar dan sekitarnya menjadi prioritas utama. Bukti-bukti pembangunan sarana pertahanan itu, hingga sekarang nampak pada peninggalan yang masih ada, seperti bunker-bunker pertahanan.

Sebaran bunker-bunker pertahanan Jepang di Makassar dan Sulawesi Selatan umumnya, menunjukkan jumlah yang cukup besar utamanya di sekitar lapangan terbang Mandai Maros. Data hasil survey dan inventarisasi Balai Pelestarian Purbakala Makassar, mengenai tinggalan berupa bunker pertahanan Jepang di Maros terdapat sebanyak 10 buah bunker yang masih ada hingga saat ini. Salah satu diantaranya adalah Bunker Jepang di Kelurahan Bontoa kampung Sambotara Kabupaten Maros. Situs itu dalam daftar inventaris BP3 Makassar tercatat

dengan nomor Register 422. Selain itu juga ditemukan di Jalan Ammanagappa dan di Laikang Tallo Kota Makassar.

Menonjolnya pembangunan sarana pertahanan Jepang di Sulawesi Selatan, menunjukkan pembenaran realitas pemerintahan Jepang yang merupakan pemerintahan militer dalam waktu perang, bukan kolonisasi jangka panjang yang damai. Oleh karena itu urgensi usaha perang lebih diutamakan, dari pada perencanaan jangka panjang untuk masa mendatang (Harvey, 1989).

Berdasarkan kondisi itu, maka pemerintah Jepang dalam menata pemerintahan sipil, hanya menggunakan struktur pemerintahan yang telah ada, dan tetap memberi peran kepada penguasa-penguasa lokal. Jepang hanya mengganti setiap tingkatan pemerintahan, seperti mengganti pemerintahan Lanchap pada jaman Belanda menjadi Soetjo. Sedangkan pada tingkat Afdeling diganti dengan istilah Ken, dan pada tingkat Onderafdeling

diganti dengan istilah Gun-Co dan pada tingkat desa disebut Ku yang dijabat oleh seorang pejabat Ku-Co (Surianingrat, 1981).

Mengenai politik pendudukan Jepang di Indonesia menurut Harvey, pada awal pendudukan ditetapkan tujuannya untuk merebut daerah itu untuk menguasai sumber daya yang dibutuhkan untuk usaha peperangan, khususnya minyak dan meniadakan sumber daya tersebut bagi kekuatan-kekuatan yang bermusuhan. Jepang berusaha mengembangkan industri hanya untuk menjamin persediaan minyak dan sumber daya yang lain secara maksimum bagi usaha peperangan. Itulah sebabnya sehingga Jepang hanya memanfaatkan organisasi-organisasi pemerintahan yang ada digunakan sebanyak mungkin (Harvey, 1989). Ini berarti bahwa pembangunan ekonomi hanya ditujukan kepada tujuan mendukung kekuatan angkatan perang/militer Jepang. Dua aspek yang dapat mendukung langsung kekuatan militer, yakni pembangunan sarana pertahanan seperti bunker dan gudang senjata, serta industri khususnya minyak.

Dalam banyak fakta di Sulawesi Selatan titik berat pembangunan itu, dapat dibuktikan dengan pembangunan bunker pada beberapa daerah seperti Makassar, Maros, Wajo, Gowa, Pare-Pare, Pinrang, Enrekang dan lain-lain. Sedangkan pembangunan industri khususnya minyak terdapat di wilayah Enrekang walaupun hingga akhir pendudukannya belum dapat berproduksi.

Di akhir masa pendudukannya di Sulawesi Selatan, ditemukan lapangan terbang yang merupakan salah satu tempat pelarian Jepang setelah kalah dalam Perang Dunia ke II, yakni Lapangan Terbang Malimpung Kabupaten Pinrang Sekarang (SPSP Sulselra, 2000).

Patut disadari bahwa walaupun pendudukan Jepang di Nusantara khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara sangat singkat, tetapi berhasil membangun sarana dan prasarana yang cukup memadai. Hal ini tidak terlepas dari sistem propaganda yang dilancarkan oleh Jepang jauh sebelum masuk ke wilayah

Indonesia. Sehingga awal masuknya Jepang di Indonesia dapat diterima dengan baik.

C. Pendudukan Jepang di Sulawesi Selatan

Pada tanggal 8 Februari 1942 kurang lebih satu resimen pasukan tempur dan Komando Kaigun mendarat di sebelah selatan kota Makassar. Batalion KNIL yang mempertahankan wilayah itu, setelah diserang dengan strategi bumi hangus mundur ke pedalaman di daerah Stelling Camba. Di daerah itu pasukan KNIL mampu mengadakan perlawanan beberapa minggu, walaupun kemudian terdesak sehingga mereka harus memilih mundur lebih jauh ke pedalaman, bahkan sampai di wilayah Sulawesi Tengah.

Selanjutnya menyusul pada tanggal 9 Februari pasukan Jepang menduduki Sinjai, yakni di pesisir timur Sulawesi Selatan, sehari kemudian menduduki Makassar dengan mendarat di Barombong, kurang lebih 10 Km sebelah selatan kota Makassar. Tentara Belanda KNIL yang masih berada di Makassar, mundur ke arah



Maros terus ke Camba dan selanjutnya sebahagian serdadu Belanda sampai ke wilayah Enrekang. Serdadu Belanda yang berada di Bone, juga kemudian bergabung dengan pasukan inti yang sebelumnya telah berada di Enrekang, namun karena kekuatan tidak seimbang, sehingga pada akhirnya serdadu Belanda menyerah kalah di wilayah Enrekang (Kadir, 1984).

Setelah Jepang menduduki kota Makassar, maka Makassar dijadikan sebagai Markas Besar Armada Barat Daya Angkatan Laut Jepang, dan sekaligus menjadikan kota Makassar sebagai Pusat Pemerintahan Sipil Angkatan Laut untuk Borneo, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil. Markas tentara Jepang dan pusat Pemerintahan itu, dipusatkan di Fort Rotterdam (Benteng Ujung Pandang). Fort Rotterdam itu, kemudian selain sebagai Markas tentara dan pusat pemerintahan, sekaligus dijadikan sebagai pusat penelitian baik penelitian pertanian maupun penelitian sumberdaya alam berupa tambang industri di wilayah kekuasaannya.

Setelah menjadikan kota Makassar sebagai markas tentara dan pusat pemerintahan, Jepang selanjutnya memikirkan pembangunan utamanya yang dapat mendukung pertahanannya. Bunker-bunker (lubang-lubang persembunyian), kemudian di bangun disekitar Kota Makassar. Pembangunan bunker-bunker pertahanan itu, dimaksudkan sebagai sarana pendukung dalam perang. Pembangunan bunker-bunker di sekitar Makassar dan khususnya pusat pemerintahan, maka kemudian mereka membangun seperti di Pulau Barrang Lompo, di Jl. Amanagappa, dan di daerah Maros, khususnya di sekitar Bandara Udara Hasanuddin. Bunker-bunker itu hingga kini masih dapat disaksikan.

Sebaran bunker-bunker Jepang di sekitar Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya, menunjukkan jumlah yang cukup banyak. Di wilayah Maros sekitar Bandar Udara Hasanuddin bunker pertahanan Jepang masih ditemukan sebanyak kurang lebih 10 buah. Bahkan di daerahdaerah lain juga ditemukan seperti di Wajo, Gowa, Pare-Pare, Pinrang dan Enrekang (mungkin daerah lain masih ada yang belum terdata).

Menonjolnya pembangunan sarana pertahanan Jepang di Sulawesi Selatan, menunjukkan pembenaran realitas pemerintahan Jepang yang merupakan pemerintahan militer dalam waktu perang, bukan kolonisasi jangka panjang yang damai. Oleh karena itu sarana pendukung perang lebih diutamakan, daripada perencanaan jangka panjang untuk masa mendatang (Harvey, 1989). Fakta-fakta histories di wilayah Sulawesi Selatan, Jepang selain membangun sarana pertahanan berupa bunker, mereka juga sangat memperhatikan pertanian dan industri. Sulawesi Selatan sebagai daerah surplus beras, yang dapat digunakan untuk kebutuhan pasukan Jepang, sehingga upaya untuk meningkatkan produksi beras sangat diperhatikan. Bukan itu saja, akan tetapi Jepang sangat memperhatikan produksi, distribusi, harga dan ekspor beras. Mereka melakukan pengawasan ketat terhadap beras, bahkan kemudian pada bulan Mei 1942 untuk mengumpulkan beras didirikan sebuah Perusahaan Laut Selatan, yang bertugas mengumpulkan beras bagi keperluan militer. Setahun kemudian perusahaan itu diberi hak tunggal untuk pengendalian, berupa

pengumpulan, distribusi, harga dan ekspor beras. Demikian bidang industri khususnya tambang, Jepang membangun Tambang Nikel di Pomalaa di kembangkan dan hasilnya dikapalkan ke Jepang atau disimpan (Harvey, 1989).

Oleh karena titik berat pembangunan Jepang dalam rangka mendukung langsung perang, maka pemerintah Jepang dalam menata pemerintahannya hanya menggunakan struktur pemerintahan yang ditinggalkan Belanda, dengan tetap memberi peran kepada penguasa-penguasa lokal dalam pemerintahan. Jepang hanya mengganti setiap tingkatan pemerintahan, seperti mengganti pemerintahan tingkat Landschap pada jaman Belanda menjadi Soetjo. Sedangkan pada tingkat Afdeling diganti dengan istilah Ken dan pada tingkat Onder Afdeling diganti dengan istilah Gun-Co dan pada tingkat desa disebut Ku yang dijabat oleh seorang pejabat bergelar Ku-Co (Suryaningrat, 1981).

Penataan pemerintahan Jepang saat itu, berdasarkan tingkatan atau struktur pemerintahan yang dilaksanakan di wilayah

Massenrempulu, dibagi dalam tingkatan menjadi Onder Afdeling Enrekang diganti menjadi Guntyo Enrekang, dan setiap Landschap yang ada seperti Landschap (kemudian menjadi Camat) Alla, Malua, Maiwa di ganti menjadi Sontyo Alla, Malua dan Maiwa. Sedangkan pada tingkat kampung pada masa pemerintah Hindia Belanda setingkat Desa dipimpin oleh seorang pejabat Ku yang disebut Kutyo. Pada tingkat Kampung dijabat oleh seorang Kutyo seperti Kutyo Baroko, Kutyo Curio, Kutyo Anggeraja dan lain-lainnya.

Jepang dalam menjalankan pemerintahannya, didasarkan pada Undang-Undang No. 1 tanggal 8 Maret 1942 yang isinya sebagai berikut :

Pasal 1. Bala Tentara Nippon melangsungkan pemerintahan Militer bagi sementarawaktu di daerah-daerah yang telah ditempatinya, agar supaya mendatangkan keamanan yang sentosa dengan segera.

Pasal 2. Pembesar Balatentara memegang kekuasaan Pemerintahan Militer yang tertinggi dan juga segala

kekuasaan yang dahulu ada di tangan Gubernur Jenderal.

Pasal 3. Semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu tetap diakui sebagai yang syah bagi sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan Pemerintahan Militer.

Pasal 4. Bala Tentara Jepang akan menghormati kedudukannya dan kekuasaan pegawai-pegawai yang setia kepada Jepang, begitu juga jiwa, harta yang syah agama sekalian rakyat yang tidak berdosa (Rahman, 1986).

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, sesuai dengan pasal 1 pemerintahan Jepang yang dijalankan oleh Militer juga sekaligus berfungsi menjaga keamanan negara yang dikuasainya, sesuai dengan hukum internasional. Berdasarkan Undang-Undang itu untuk wilayah Indonesia (Hindia Belanda, pada jaman Belanda), dipusatkan di bawah komando Panglima Besar. Sedangkan untuk

seluruh wilayah Asia Tenggara oleh Nanpogun berkedudukan di Saigon.

Untuk memperlancar jalur komando pemerintahan di Indonesia, maka wilayah kekuasaan Indonesia di bagi lagi menjadi tiga wilayah pemerintahan, yakni

1. Tentara keenam belas untuk wilayah Pulau Jawa dan Madura dengan pusatnya di Batavia (kemudian disebut Jakarta).
2. Tentara kedua puluh lima untuk wilayah Pulau Sumatera dengan pusatnya di Bukit Tinggi.
3. Armada Selatan kedua untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat dengan pusatnya di Makassar (Rahman, 1986).

Secara lengkap, pemerintahan Jepang di Sulawesi Selatan disusun sebagai berikut :

Gubernuran (Propinsi) = Gunseikanku, Gubernur =
Gunseikan

Keresidenan	= Si, Residen = Sityo (Sutjo)
Kabupaten	= Ken , Bupati = Kentyo
Kewedanaan	= Gun , Wedana= Guntyo
Kecamatan	= Son, Camat = Sontyo
Kelurahan	= Ku, Lurah = Kutyo
Rukun tetangga	= Tunani, Gumi= Kepala RT = Tunani Gumityo.

Dengan berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Jepang No. 1 tahun 1942, maka daerah-daerah yang sudah diduduki, berlaku hukum militer. Ketentuan tersebut berlaku juga di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan diduduki oleh Angkatan Laut Jepang. Pada masa itu, Makassar dijadikan sebagai pusat pemerintahan Militer Jepang, yang dipimpin oleh seorang pejabat setingkat Gubernur pada masa Hindia Belanda yang disebut Min Seibu. Daerah-daerah Sulawesi Selatan, kemudian dibagi menjadi lima daerah setingkat Kabupaten, yang dipimpin oleh seorang pejabat yang disebut Ken Kanrikan.

Keenam Ken Kanrikan itu, adalah Makassar Ken Kanrikan, dengan Makassar sebagai ibukotanya. Ken Kanrikan Makassar meliputi Gowa, Maros, Pangkajene, Takalar, dan Jeneponto. Pare-Pare Ken Kanrikan dengan Pare-Pare sebagai pusatnya, meliputi Barru, Sidrap, Pinrang, dan Enrekang. Kemudian Luwu Ken Kanrikan, dengan pusat Palopo, meliputi Palopo, Masamba, Malili, Makale, dan Rante Pao. Bone Ken Kanrikan dengan Watampone sebagai pusatnya, meliputi Bone, Soppeng, Wajo, Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng. Mandar Ken Kanrikan, dengan Majene sebagai pusatnya, meliputi Majene, Polewali, Mamasa dan Mamuju.

D. Pendudukan Jepang di Enrekang

Setelah wilayah Sulawesi Selatan dikuasai oleh Jepang, dimulai dengan pendudukannya di Sinjai pada tanggal 9 Februari 1942, Makassar pada tanggal 10 Februari, maka selanjutnya pasukan Jepang meneruskan penyerangan serdadu Belanda ke wilayah Enrekang. Di wilayah Enrekang kemudian serdadu Belanda menyerah kalah.

Dengan fakta itu, maka Enrekang merupakan salah satu daerah dimana pasukan Jepang mengalahkan Belanda. Kemenangan Jepang atas Belanda, termasuk di wilayah Enrekang, maka dengan sendirinya sama dengan daerah-daerah lainnya markas-markas tentara dan pusat/kantor-kantor pemerintahan milik Belanda diambil alih. Di pusat kota Enrekang yang pada masa pemerintahan Hindia Belanda merupakan pusat pemerintahan tingkat Kewedanaan (sebelumnya Onder Afdeling), mempunyai selain markas tentara Belanda, juga ada bangunan perkantoran pemerintah.

Mengacu pada Undang-Undang Pemerintahan darurat Jepang yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1942, maka segala fasilitas dan penataan pemerintahan sebelumnya dilanjutkan atau dimanfaatkan kembali, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Pemerintahan Militer Jepang. Selain itu, Jepang juga merebut dan mengambil alih pasilitas berupa Markas dan tempat peristirahatan Belanda di Kalosi, yakni merebut Pessanggrahan Belanda di Kalosi dan sekaligus menjadikan sebagai markas

tentaranya. Enrekang dan Kalosi menjadi Markas dan pusat pemerintahan Jepang di Enrekang sejak awal masuknya yakni pada akhir bulan Februari 1942.

1. Pemerintahan

Setelah menduduki Enrekang, sesuai dengan politik pendudukan Jepang di Indonesia, yang menurut Harvey (1989), pada awalnya bertujuan untuk merebut daerah untuk menguasai sumber daya yang dibutuhkan untuk peperangan. Melihat kondisi wilayah Enrekang, yang mempunyai sumber daya alam yang baik, baik dalam rangka pertahanan maupun untuk memenuhi kebutuhan hidup tentara dan industri, maka Pemerintahan Militer Jepang mulai menata kekuasaannya dengan baik.

Pemerintahan Militer Jepang yang berkedudukan di Enrekang, langsung menggunakan perangkat pemerintahan yang ada sebelumnya dan langsung memanfaatkan dalam rangka pelaksanaan kekuasaannya. Jepang hanya mengganti nama-nama jabatan yang sebelumnya sudah ada, dan tetap

mempertahankan orang yang menduduki jabatan, pada semua tingkatan pemerintahannya.

Enrekang sebagai suatu wilayah, yang pada masa pemerintah Belanda berstatus Kewedanaan, kemudian diganti dengan sebutan Gun dan dipimpin oleh seorang pejabat bergelar Guntyo. Sedangkan tingkat pemerintahan Landschap pada masa Belanda diganti menjadi Son dengan pimpinan pemerintahannya disebut Sontyo. Pejabat-pejabat pada tingkatan pemerintahan itu, seperti halnya pada masa Belanda, pejabatnya adalah raja-raja setempat. Karena pejabatnya adalah raja-raja setempat, maka rakyatnya tetap mengakui perintahnya sebagaimana layaknya seorang raja. Kondisi itu juga, kemudian membantu posisi Jepang dalam menjalankan programnya, utamanya dalam upaya penyediaan tenaga kerja untuk pembangunan, seperti membangun pertahanan dan industri.

2. Membangun Pertahanan dan Pembinaan Generasi Muda

Program awal pemerintahan Jepang sejak menduduki wilayah Enrekang, adalah membangun bunker-bunker pertahanan/sarana pertahanan dan industri untuk mendukung peperangan. Bersamaan dengan itu, para tentara Jepang juga mengadakan pembinaan terhadap generasi muda. Pembinaan generasi muda itu, juga diharapkan untuk tujuan mendukung dalam peperangan.

Pembangunan sarana pendukung pertahanan, yakni membangun bunker-bunker/lubang-lubang pertahanan. Pembangunan bunker-bunker pertahanan Jepang di wilayah Enrekang, dari segi jumlah cukup banyak. Hasil inventarisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang tahun 2004, berhasil menginventarisasi sebanyak 7 buah bunker. Bunker-bunker tersebut, tersebar di wilayah-wilayah pegunungan seperti di jejeran pegunungan Bamba Puang di daerah Kotu, bahkan di wilayah perbatasan

Enrekang dan Pinrang yakni di Malimpung juga ditemukan bunker.

Di wilayah perbatasan Pinrang dan Enrekang di Malimpung, ditemukan sebuah bunker di atas puncak gunung dan pada bagian bawah di kampung Malimpung ditemukan sebuah hangar yang menandakan bekas Lapangan Udara yang pernah di gunakan oleh Jepang (Natsir dkk, 2003).

Pembangunan bunker-bunker pertahanan Jepang, dilakukan dengan jalan kerja paksa. Konsep pelaksanaan kerja paksa yang diterapkan oleh Jepang, pada dasarnya hampir sama dengan kerja wajib yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kerja paksa itu dilakukan dengan mewajibkan setiap anggota masyarakat yang sudah dewasa untuk ikut dalam kegiatan pembangunan, termasuk pembangunan pertahanan. Fungsi pemerintahan local juga sangat berarti dalam memobilisasi tenaga kerja, dan dalam pelaksanaannya diawasi langsung oleh tentara Jepang. Oleh karena pengawasan itu

langsung oleh tentara, sehingga sangat dirasakan oleh masyarakat.

Selain membangun sarana pertahanan, Jepang sejak menduduki wilayah Enrekang, juga membangun dan mendirikan pendidikan militer, pada tahun 1944. Pendidikan itu didirikan di wilayah Anggeraja, yakni di kampung Carruk. Tujuan utama pembinaan militer itu, adalah untuk membina pemuda-pemuda di wilayah Enrekang dan bahkan ada yang didatangkan dari luar Enrekang, untuk tujuan membantu Bala Tentara Jepang kelak untuk menghadapi tentara Sekutu. Peserta latihan militer yang dilakukan oleh Jepang itu, adalah pemuda-pemuda berumur sekitar 14 dan 15 tahun. Masyarakat setempat menyebutnya dengan (di pangbarisi), dalam satu kelompok bernama Seinendan untuk kelompok umur 15 tahun, sedangkan kelompok umur 14 tahun ke bawah disebut Seinenku Rensho. Latihan baris-berbaris itu, dilakukan bukan saja di Carruk sebagai pusat pendidikan, akan tetapi juga dilakukan di wilayah lainnya di Enrekang seperti di

Bantu Tangla. Pelatihan militer atau barisan pertahanan rakyat itu, dibina dan dipimpin langsung oleh tentara Jepang.

Barisan pertahanan rakyat lainnya yang dibentuk oleh Jepang, yaitu Keibodan yang khusus berfungsi sebagai barisan Bantu kepolisian, Suisintai, yaitu barisan pelopor yang bertugas memelopori pertahanan wilayah dari serangan Sekutu. Disamping itu dikenal juga kelompok pertahanan/latihan militer dibentuk Heiho, yang tujuan pokoknya adalah pasukan Bantu Angkatan Darat. Murid-murid peserta pelatihan militer Jepang itu, dimaksudkan sebagai tentara pembantu Jepang, sebagai pasukan Bantu dan bahkan diharapkan menjadi pasukan berani mati (jabakutai).

Murid-murid latih militer Jepang itu, selain mendapatkan latihan fisik militer, mereka juga diberi materi yang berfungsi mencuci otaknya dan mengarahkan agar mereka anti Sekutu, seperti Inggris dan Amerika. Upaya psikologis itu, dilakukan dalam bentuk nyanyian-nyanyian dalam pendidikan. Salah

satu nyanyian-nyanyian itu dikemukakan oleh Nawir; Awas Inggris dan Amerika, musuh bagi Asia, Inggris harus diberi linggis, Amerika harus disterika (Nawir, 1997). Nyanyian itu merupakan bahagian dari pemberi semangat militer, dan secara emosional membangkitkan semangat anti Inggris dan Amerika. Luaran pendidikan latihan militer Jepang itu, kemudian banyak yang menjadi pejuang (mempunyai pengetahuan militer), dalam masa perjuangan melawan penjajah termasuk Penjajah Jepang. Hal itu kemudian dibuktikan dengan pemberian Tanda Kehormatan bagi orang yang memberi pertolongan melawan Jepang tahun 1942-1945, yang dilakukan kemudian oleh Zelfbeestuur Enrekang pada tahun 1949. Pemberian penghargaan itu dilakukan melalui Surat tanggal 2 Agustus 1949 (Arsip Pemda Tk. II Enrekang, Reg. No. 47).

Luaran latihan militer Jepang itu seperti Uwak Gading, Uwak Tapak, Ambe Teppo, Puang Senga, Matta dan sebagainya. Nama-nama itu kemudian menjadi lasykar pejuang pada

jaman revolusi kemerdekaan. Sekolah-sekolah militer yang didirikan oleh tentara Jepang di Anggeraja Enrekang, adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan Seinendan (latihan pertahanan rakyat), pendidikan itu khusus bagi pemuda yang berumur 15 tahun ke atas.
- b. Pendidikan Seinenku-Rensho (latihan pertahanan rakyat). Latihan kemiliteran itu khusus diperuntukkan bagi anak-anak berumur 14 tahun ke bawah.
- c. Keibodan (barisan Bantu kepolisian).
- d. Pendidikan Suisintai (barisan pelopor pertahanan wilayah).
- e. Heiho (barisan Bantu Angkatan Darat).

Pendidikan militer Jepang yang ditempatkan di Carruk Anggeraja Enrekang itu, diikuti oleh pemuda-pemuda utusan selain dari Enrekang sendiri, juga utusan dari daerah lain seperti Lueu, Tator, Sidrap, Pinrang dan lain-lain. Setelah mengikuti pendidikan itu, semua dikembalikan ke daerahnya masing-masing.

3. Pembangunan Industri Tambang

Pembangunan industri tambang di wilayah Enrekang pada masa pendudukan Jepang, juga dilakukan. Pembangunan industri tambang itu, utamanya yang bertujuan langsung untuk mendukung pertahanan dan perang. Oleh karena itu, maka sasaran utamanya adalah Tambang Minyak.

Tambang Minyak Bumi yang dilakukan oleh tentara Jepang di wilayah Enrekang, mengacu pada hasil penelitian geologis yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebelumnya. Salah satu potensi alam Enrekang yang potensial seperti laporan Belanda, yakni temuan Minyak Bumi di kampung Batu Ke'de. Berdasarkan informasi geologis Belanda, pemerintahan Militer Jepang mengadakan penelitian ulang dan hasilnya positif. Itulah sebabnya sehingga pemerintah Jepang berkeputusan untuk mengadakan pengeboran Minyak Bumi yang ada di Batu Ke'de (sekarang berada di wilayah Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang).

Pada sekitar tahun 1944, pemerintahan Militer Jepang mengusahakan pengeboran minyak Bumi di daerah Batu Ke'de. Pengeboran itu dilakukan dengan menggunakan teknologi pengeboran yang canggih, dengan menggunakan alat pengebor modern. Pengeboran itu dibuktikan dengan adanya sumur minyak di Batu Ke'de, dan temuan satu buah baja asli berbentuk bulat bundar di perumahan penduduk Batu Ke'de. Bentuknya seperti gorong-gorong dengan diameter sekitar satu meter. Daerah sumur minyak Batu Ke'de hingga sekarang, khususnya pada musim kemarau, sekitar sumur minyak itu tidak ditumbuhi rumput (rumputnya mati). Pengeboran itu, selain menggunakan tenaga ahli Jepang, juga menggunakan tenaga penduduk lokal, utamanya pada saat menurunkan bahan sumur minyak. Pengeboran minyak bumi oleh Jepang, tidak selesai, karena menyerah kalah kepada Sekutu.

4. Kehidupan Masyarakat Masa Pendudukan Jepang

Pada awal pendudukan militer Jepang di Enrekang, sebetulnya mendapat simpati dari masyarakat. Simpati masyarakat

muncul, karena sejak awal kedatangannya, mereka membagi-bagikan makanan kepada penduduk karena melihat kondisi masyarakat yang miskin. Kemiskinan itu terjadi akibat kebijakan Pemerintah Hindia Belanda, yang melarang atau tidak memberi kebebasan kepada rakyat mengolah sawah dan ladangnya secara bebas. Larangan atau pembatasan kebebasan rakyat oleh Pemerintah Hindia Belanda, kemudian oleh Jepang memberi kebebasan untuk mengolah tanahnya.

Pada sekitar tahun 1944, arah kebijakan pemerintah Jepang mulai berubah. Dalam rangka mendukung program pembangunan bunker-bunker pertahanan (Lubang-lubang persembunyian) Jepang, memaksakan kepada kaum laki-laki untuk bekerja setiap saat (kerja paksa). Dengan demikian kesempatan rakyat, utamanya kaum laki-laki untuk mengolah tanah garapannya semakin berkurang. Akibatnya, adalah munculnya kemiskinan dan kekurangan makanan dan pakaian. Kekurangan makanan akibat kerja paksa, berimplikasi pada semakin kuatnya kebencian rakyat kepada Jepang.

Kekurangan makanan yang dirasakan oleh rakyat, selain disebabkan oleh kurangnya waktu untuk mengolah tanah, juga disebabkan oleh perilaku tentara Jepang yang, mengambil hasil-hasil pertanian rakyat. Bahkan barang-barang kebutuhan pokok rakyat, seperti garam, ikan, beras, dan sebagainya dihadang oleh tentara Jepang sebelum masuk ke wilayah Enrekang. Kondisi itu berlangsung sejak tahun 1943-1944. Dengan kondisi itu, maka rakyat hanya mampu mengkonsumsi hasil-hasil bumi, utamanya berupa umbi-umbian. Bahkan pada saat itu masyarakat banyak mengkonsumsi makanan berupa hasil tanaman liar di hutan yakni Sikapa.

Kondisi kehidupan masyarakat yang semakin sulit, ditambah lagi dengan perilaku buruk tentara, dimana mereka tidak memperdulikan tanaman penduduk. Misalnya ketika mereka melewati kebun dengan berkuda, maka mereka tidak menghiraukan apakah tanaman rakyat rusak atau tidak, bahkan dengan kesombongan membiarkan hewan-hewan itu

memakan tanaman penduduk. Dengan adanya pembatasan konsumsi oleh penduduk, karena makanan dan sayur-sayuran yang ada diambil oleh tentara, dalam rangka memenuhi kebutuhannya, maka penduduk hanya dibolehkan mengkonsumsi makanan-makanan tertentu. Makanan-makanan seperti kacang-kacangan, dikonsumsi oleh penduduk harus dengan sembunyi-sembunyi, agar tidak diketahui oleh Jepang.

Kondisi itu, juga terjadi pada pemenuhan kebutuhan Pangan, berupa kebutuhan pakaian. Tentara Jepang membatasi jenis pakaian (kain) yang masuk ke wilayah Enrekang. Pada saat itu, masyarakat banyak yang menggunakan pakaian dari bahan-bahan yang sangat kasar, dengan jumlah yang sangat terbatas. Masyarakat bahkan menggambarkan bahwa pakaian pada saat itu diandaikan seperti karung saja.

Kemiskinan dan kekurangan bahan pangan yang disebabkan oleh penduduk, semakin meningkatkan kebencian masyarakat

kepada Jepang. Itulah sebabnya sehingga rakyat tidak mau membantu Jepang, ketika diserang Pasukan Sekutu. Akhirnya Jepang takluk pada pasukan Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945.

E. Kekalahan Jepang

Kekalahan Jepang, pada tanggal 14 Agustus 1945, membawa perubahan yang sangat besar terhadap kondisi psikologis rakyat Indonesia, termasuk rakyat Massenrempulu Enrekang. Rakyat Indonesia secara umum dan rakyat Massenrempulu secara khusus, memendam kebencian dan anti pati terhadap Jepang. Masyarakat merasakan penderitaan yang luar biasa akibat penjajahan, bukan saja penderitaan fisik karena kekurangan sandang dan pangan (makanan dan pakaian), akan tetapi kebencian rakyat atas keberadaan Jepang dengan prilakunya, bahkan dirasakan sampai pada penginjakan harga diri. Luapan kemarahan Jepang dengan menempeleng muka (Harvey, 1989), suatu contoh perilaku yang sangat bertentangan adat kebiasaan orang Bugis Makassar, termasuk di wilayah Massenrempulu.

Kebencian yang mendalam itu, melahirkan perasaan/ jiwa patriotisme masyarakat. Kebencian terhadap Jepang itu, dibarengi dengan suatu keyakinan bahwa Belanda bukanlah Negara yang tidak dapat dilawan. Pendudukan Jepang dan kekalahan Belanda, menjadi bukti nyata bagi masyarakat Bangsa Indonesia. Suatu pengalaman yang dirasakan oleh rakyat (misalnya dengan latihan militer), yang telah diberikan oleh tentara Jepang, seperti pendidikan militer yang dilaksanakan di Enrekang, seakan menjadi sebuah modal, dan menggugah semangat para pemuda. Demikian pula lagu-lagu Jepang, yang menempatkan Belanda (dan Sekutunya Inggris dan Amerika), memberi pengaruh tersendiri di hati rakyat dan pemuda.

Dengan jiwa patriotisme itulah, kemudian para pemuda dan rakyat bangkit. Itulah kemudian yang melatarbelakangi munculnya para pemuda pejuang, baik di pusat maupun di daerah untuk bangkit melawan penjajah. Munculnya wadah perjuangan rakyat berupa kelasykaran, merupakan bukti nyata upaya perjuangan rakyat dan Pemuda. Di wilayah

Massenrempulu/ Enrekang kemudian lahir kelasykaran-kelasykaran perjuangan rakyat seperti PNI (Pemuda Nasional Indonesia), HI (Harimau Indonesia) dan lain-lain. Wadah-wadah perjuangan itulah yang menjadi tempat para pemuda berjuang melawan Penjajah dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.



PETA PERSEBARAN BUNKER DI KECAMATAN ANGGERAJA KABUPATEN ENREKANG

DESKRIPSI BUNKER JEPANG DI KABUPATEN ENREKANG

Bunker Jepang A

Lokasi bunker Jepang A terletak di Dusun Lura, Desa Mendatte, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Dari jalan poros Enrekang-Toraja pada KM.20 tepatnya di rumah makan Gua

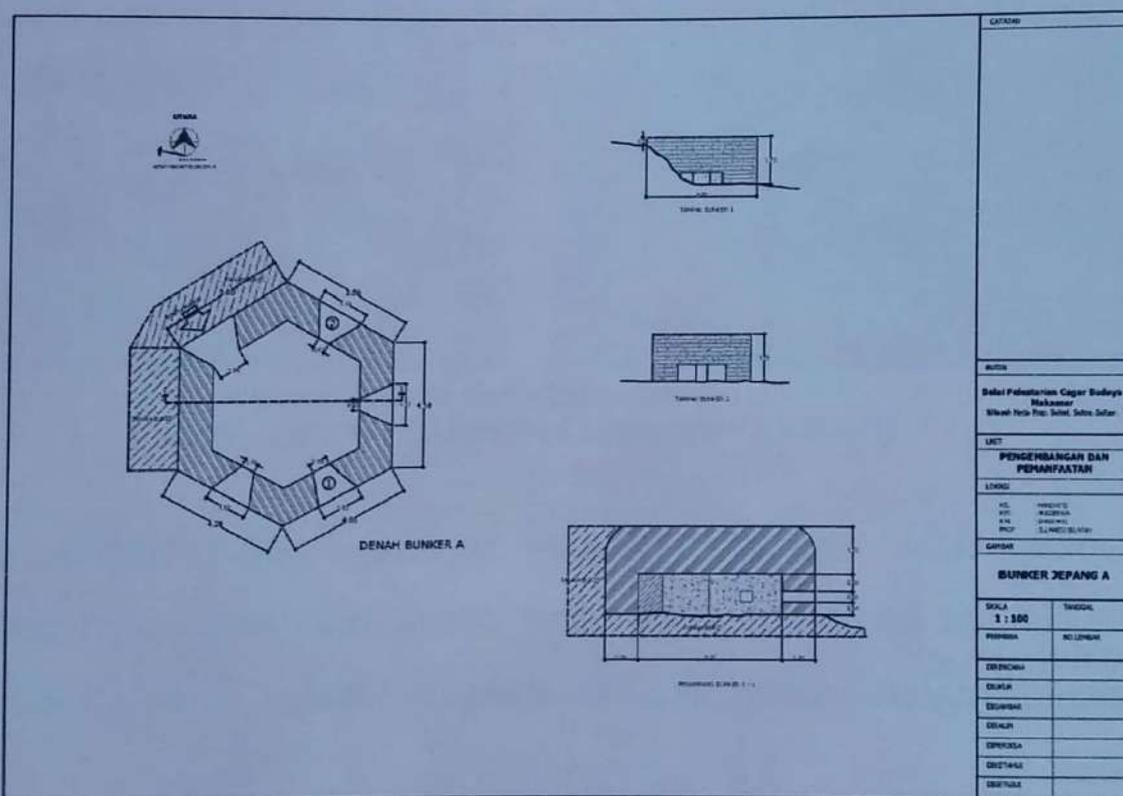


Foto 1. Letak Bunker Jepang A
(Dok. Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar, 2013)

Jepang, kendaraan dihentikan dan dilanjutkan berjalan kaki melalui samping rumah makan sejauh 150 meter ke arah timur sampai diujung bukit.

Bunker berbatasan dengan jurang/lereng bukit di sebelah utara, Sungai Mata Allo/ Gunung Buntu Kabobong di sebelah timur, jurang/lereng bukit di sebelah selatan dan Rumah Makan Gua Jepang/jalan poros di

sebelah barat. Secara geografis/astronomis bunker berada pada titik koordinat S 03° 27' 00.6" E 119° 47' 37.9" dengan ketinggian 627 meter di atas permukaan laut.



Gambar 1. Denah Bunker Jepang A

Bunker terletak di puncak bukit dikelilingi lereng bukit gundul yang dimanfaatkan untuk lahan berkebun. Kondisi ini dikhawatirkan akan mempercepat kerusakan dan mengancam

keberadaan bunker. Bunker utuh berbentuk segi enam, pintu berada di sebelah barat daya dengan lubang pengintai/jendela berjumlah 4 buah dan 3 buah lubang kecil di bagian atas. Pintu



Foto 2. Lubang intai/jendela Bunker Jepang A
(Dok.Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar, 2013)

bunker tidak terlihat dari luar karena dinding bagian barat seluruhnya tertimbun tanah dan untuk memastikannya terlebih dahulu masuk ruang bunker melalui lubang intai/jendela sisi timur.

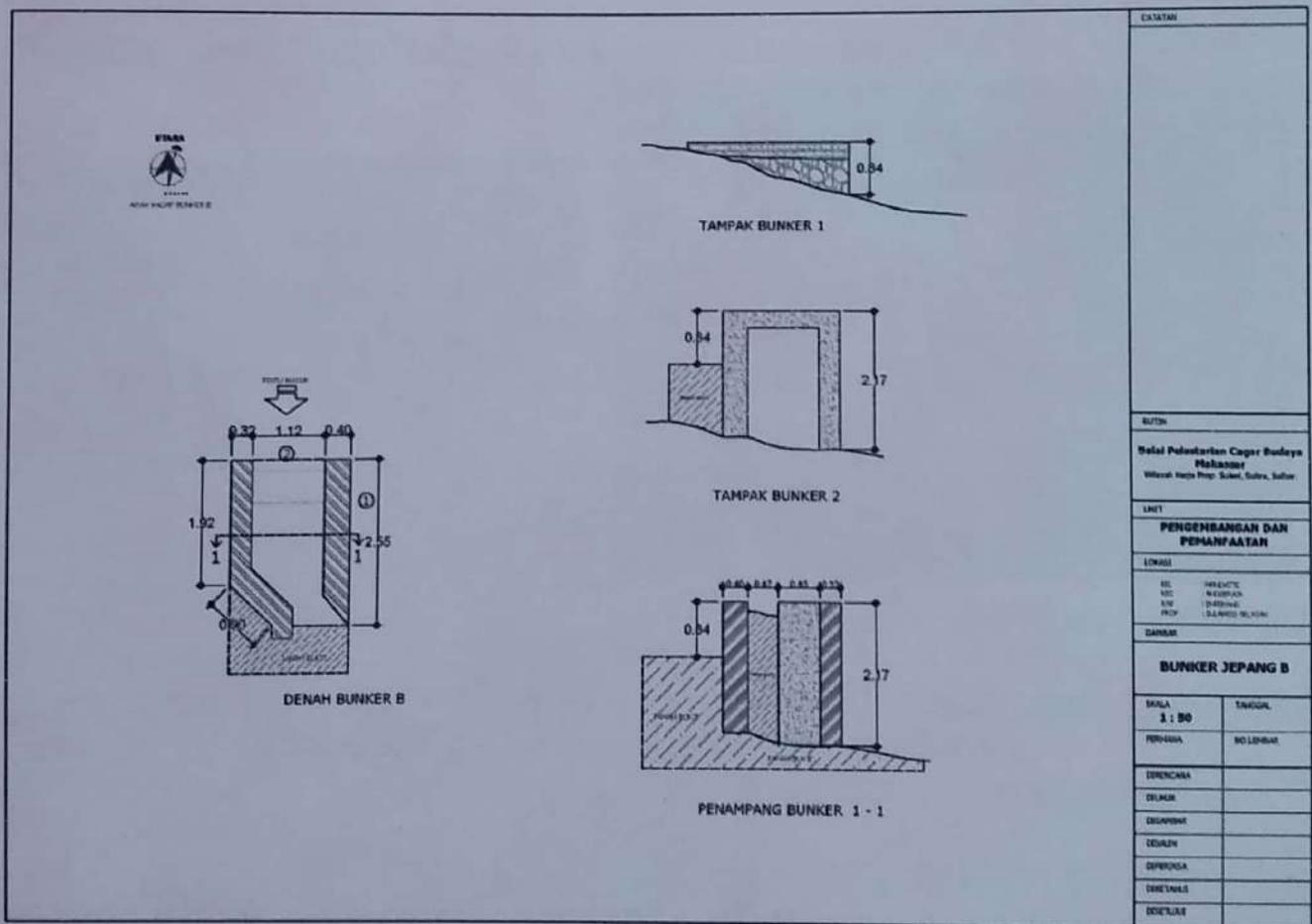
Bunker berukuran : panjang 2.60 m, lebar 2 m, tinggi 2 m
dan tebal dinding 1 m.

Pintu : tinggi 0.70 M (terlihat dipermukaan),
lebar 1 m

Lubang intai/jendela: panjang 1 m – 1.20 m, lebar 0.50 m.

Bunker Jepang B

Secara administratif Bunker Jepang B masuk dalam wilayah Dusun Lura, Desa Mandatte, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Bunker ini terletak di pinggir jalan poros Enrekang-Toraja berdekatan dengan Rumah Makan Gua Jepang berjarak



Gambar 2. Denah Bunker Jepang B

100 meter ke arah utara. Dari jalan poros ke arah timur berjarak \pm 10 meter menerobos rimbunnya semak belukar sampai di Bunker Jepang B. Adapun batas-batasnya adalah di sebelah utara dengan jurang/semak belukar, di sebelah timur dengan jurang/Sungai Mata Allo, di sebelah selatan dengan Rumah Makam Gua Jepang/Bunker Jepang B, dan di sebelah barat dengan jalan poros Enrekang-Toraja.



Foto 3. Kondisi Bunker Jepang B
(Dok. Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar, 2013)

Bunker berbentuk persegi empat memanjang timur laut – Barat daya berukuran panjang 2.53 m, lebar 1.94 m dan tinggi 180 m

dengan ketebalan dinding 40 cm. Bunker dalam kondisi rusak parah (hilang) terutama dinding timur dan bagian atap, dinding utara dan dinding selatan terus berlanjut menyerong ke arah barat daya, dinding barat tidak terlihat karena tertimbun tanah dan semak belukar. Dari dinding yang tersisa tidak ditemukan lubang intai/jendela maupun pintu bunker. Bunker Jepang B berada dititik koordinat S 03⁰ 26' 5.0" E 119⁰ 47' 36.3" pada ketinggian 641 meter di atas permukaan laut.

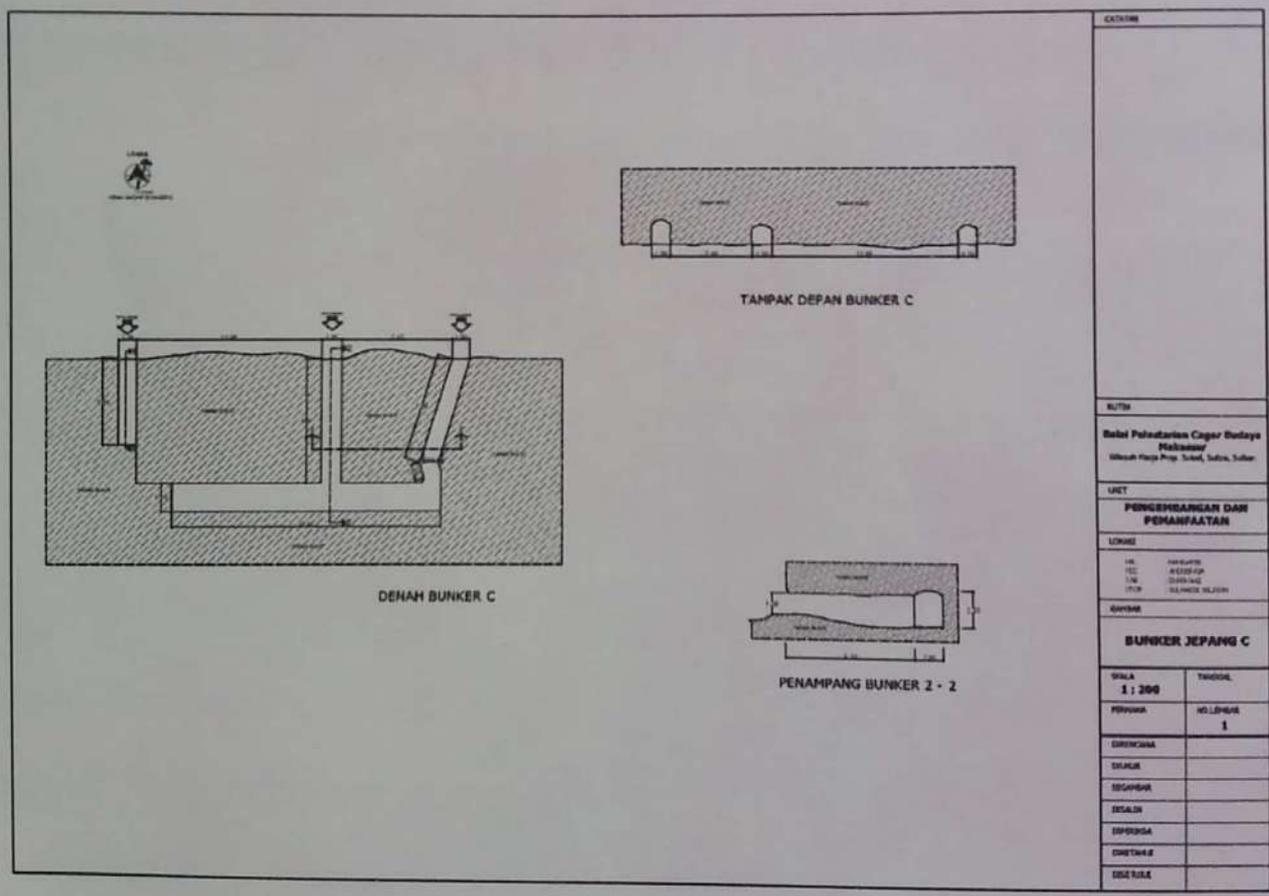
Bunker C



Foto 4. Kondisi lingkungan bunker C
(Dok. Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar,
2013)

Bunker ini berada pada titik koordinat S 03⁰27'10.0" E 119⁰ 47' 27.4" dengan ketinggian 630 meter dari permukaan laut. Bunker ini merupakan bunker tanah yang berada di kaki bukit Buttu Batu sisi utara

berjumlah 3 buah bunker. Bunker pertama terletak paling barat ditandai dengan adanya 2 pohon besar di depan bunker. Bunker kedua terletak di sebelah timur bunker pertama berjarak 11,40 meter.



KOTA	
KUTUB	
Balai Pelestarian Cagar Budaya Mabassar Jl. Raya Prop. Sulu, Sulu, Sulu	
UNIT	
PERSEKIPAN DAN PERMANFAATAN	
LOKASI	
NO	NO KOTAK
GAMBAR	
BUNKER JEPANG C	
SKALA	TANGGAL
1 : 200	
PERUSAHA	NO. LEMBAR
	1
DIRENCANA	
DIAJUK	
DISAHKAN	
DISALAH	
DISERVISI	
DIREVISI	
DISERVISI	

Gambar 3. Denah Bunker Jepang C

Bunker kedua mempunyai lorong menembus ke bunker ketiga yang terletak paling timur dengan panjang lorong 32.20 meter, jarak mulut bunker kedua dan ketiga adalah 15.50 meter, masing-masing bunker berukuran :

Bunker C1 : lebar mulut 200 cm, tinggi 140 cm dengan kedalaman 6 meter.

Bunker C2 : lebar mulut 170 cm, tinggi 130 cm.

Bunker C3 : lebar mulut 170 cm, tinggi 120 cm.



Foto 5. Bunker C1
(Dok. Balai Pelestarian Cagar Budaya
Makassar, 2013)

Ketiga bunker menghadap ke utara berhadapan dengan sungai mengering dan bukit yang dipenuhi pepohonan besar dan rumpun bambu yang cukup lebat, cahaya yang masuk ke bunker berkurang sehingga bagian dalam bunker sangat gelap dan lembab.

Secara administratif bunker berada di wilayah Dusun Lura, Desa Mendatte, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Bunker ini sangat mudah dijangkau melalui jalan poros Enrekang-Toraja pada KM.19, kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki kearah timur sejauh \pm 250 meter melewati halaman belakang rumah penduduk. Adapun batas-batas arealnya adalah di sebelah utara dengan sungai yang mengering/bukit, sebelah timur dan selatan berbatasan dengan bukit Buttu Batu dan di sebelah barat dengan rumah penduduk/jln.poros.

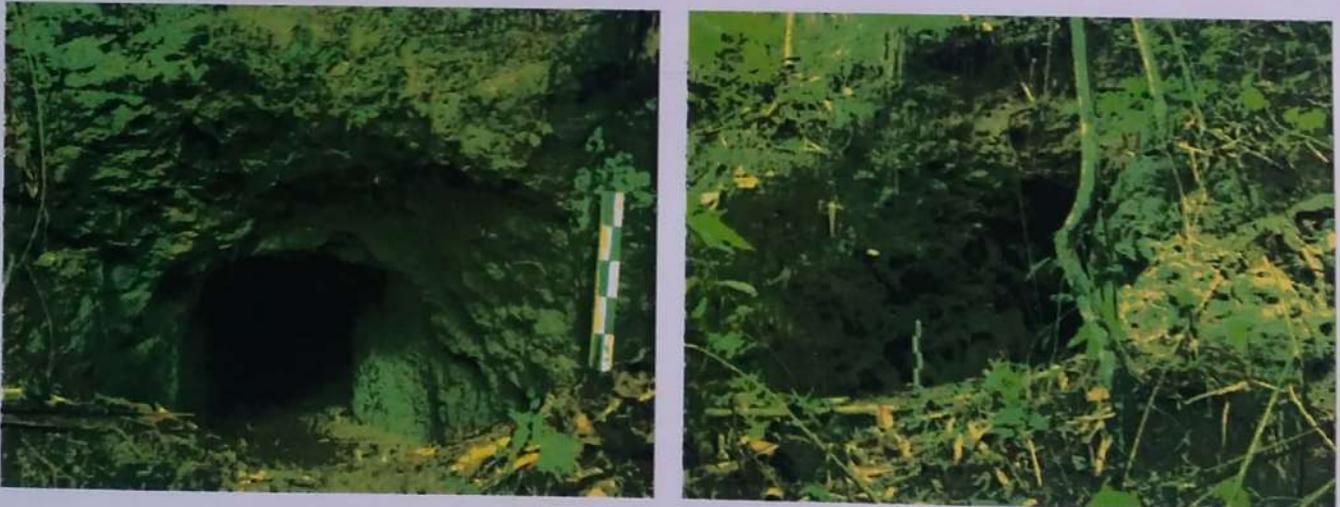
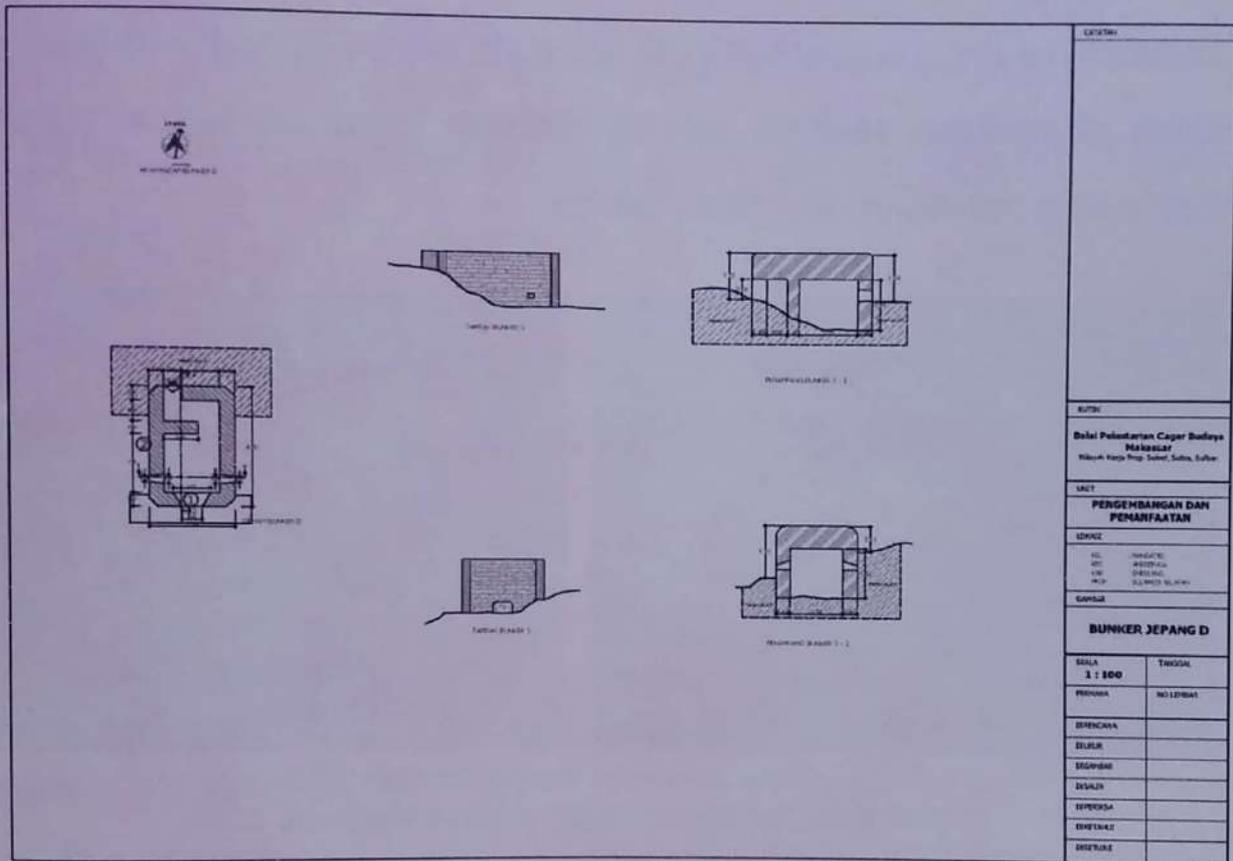


Foto 6. Bunker C2 dan C3
(Dok.Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar, 2013)

Bunker Jepang D



CATATAN	
KUTIP	
Dala' Pelestarian Cagar Budaya Makassar Klasifikasi Prop. Sifat, Substansi, Sifat	
UNIT	
PERGEMBANGAN DAN PENARFAATAN	
LOKASI	
NO.	TANGGAL
DIS.	REVISI
SK.	REVISI
PKP.	REVISI
GAMBAR	
BUNKER JEPANG D	
SALA	TINGGI
1 : 100	NO LEMBAR
BRENCANA	
DIKERJAKAN	
DISERVISI	

Gambar 4. Denah Bunker Jepang D

Bunker Jepang D terletak di Dusun Lura, Desa Mendatte, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Dari jalan poros Enrekang-Toraja berbelok ke arah timur masuk jalan desa ± 200 meter, perjalanan dilanjutkan berjalan kaki mendaki bukit Buttu

Lura dengan kemiringan 45° menembus semak belukar dengan kondisi jalan licin dan terjal. Bunker berbatasan dengan bukit di sebelah utara, hutan/bukit di sebelah timur, semak belukar/jalan desa di sebelah selatan dan di sebelah barat berbatasan dengan bak penampungan air/ jalan poros.



Foto 7. Kondisi Bunker Jepang D
(Dok.Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar, 2013)

Bunker dalam kondisi utuh berbentuk persegi empat dengan pintu di sebelah utara (seluruh dinding utara tertimbun tanah), keberadaan pintu dapat diketahui setelah masuk dalam bunker melalui lubang pengintaian/jendela. Terdapat 2 buah lubang pengintaian (1 besar, 1 kecil). Di dalam bunker terdapat sekat beton yang membatasi ruang dalam bunker dengan pintu.

Bunker berukuran : 467 cm x 315 cm x 200 cm dan tebal 120 cm

Pintu : 100 cm x 69 cm (sebagian tertimbun tanah)

Lubang intai/jendela : 60 cm x 30 cm dan tebal 120 cm
(besar) 20 cm x 16 cm (kecil).

Secara geografis/astronomis berada pada titik koordinat S $03^{\circ}27'16.4''$ E $119^{\circ}47'25.6''$ dengan ketinggian 663 meter dari permukaan laut.

Bunker Jepang E

Secara administratif bunker Jepang E terletak di Dusun Bambapuang, Desa Mendatte, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Situs ini dapat dijangkau melalui jalan desa (cor beton) sampai di rerimbunan pohon mangga besar, dilanjutkan dengan jalan kaki menapaki kebun jagung menuruni lembah sejauh \pm 600 meter ke arah timur. Adapun batas-batas areal adalah jurang/bukit di sebelah utara, kebun penduduk/Sungai Mata Allo

di sebelah timur, kebun jagung/lembah di sebelah selatan dan kebun jagung di sebelah barat.



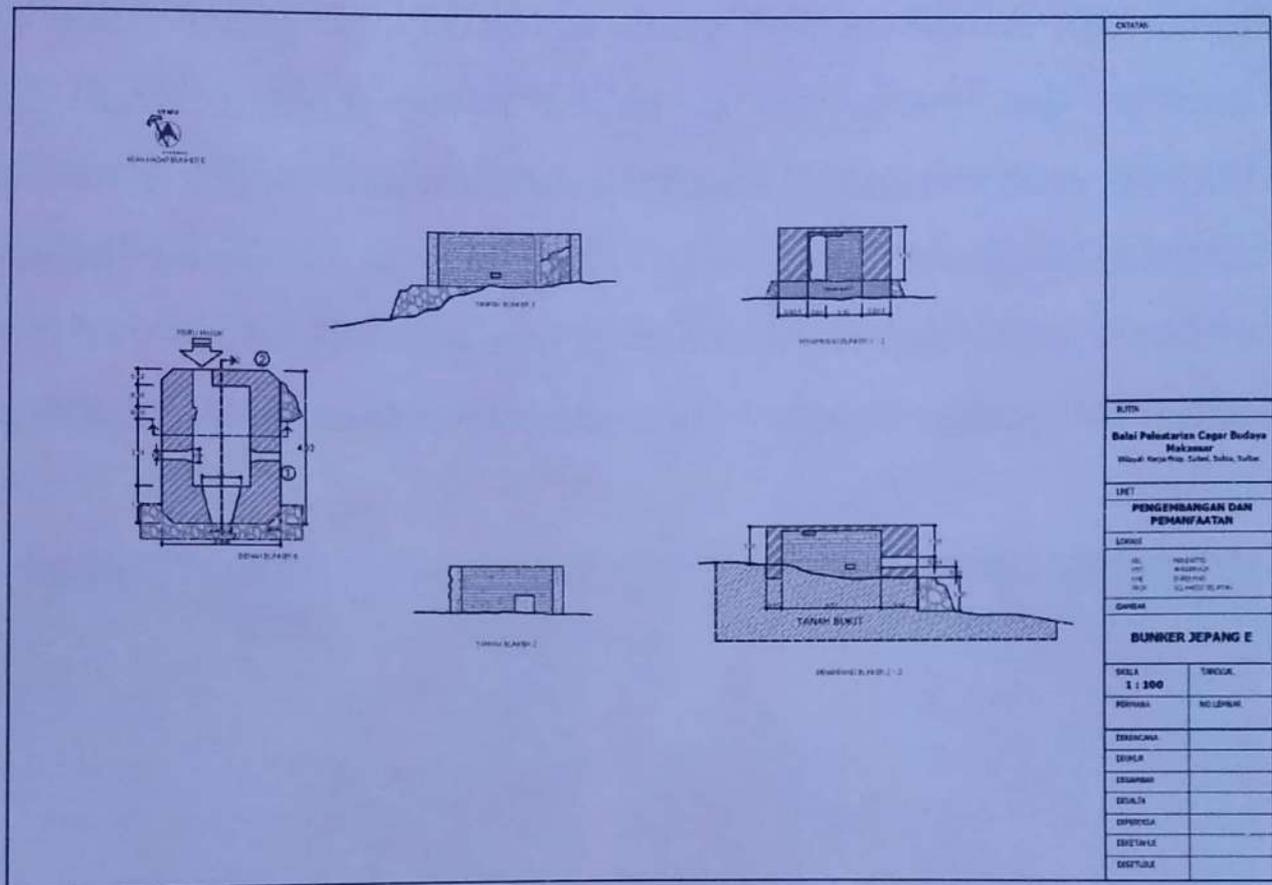
Foto 8. Kondisi Bunker Jepang E
(Dok.Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar, 2013)

Secara geografis/astronomis berada pada titik koordinat $S 03^{\circ}27'32.6''$ $E 119^{\circ} 47' 36.6''$ dengan ketinggian 551 meter dari permukaan laut. Bunker ini berada di punggung/lereng bukit sisi timur, bunker berbentuk segi enam dengan pintu di sebelah barat dan 4 buah jendela (lubang mengintai) :

Bunker : panjang keseluruhan 15.30 m, tinggi 3 m.

Pintu : Tinggi 1.60 m, lebar 1 m, tebal 0.52 m.

Lubang pengintai: panjang 1.30 m, lebar 0.65 m dan tebal 0.52 m



Gambar 5. Denah Bunker Jepang E

Pada dinding barat terdapat lubang besar/terowongan tanah sepanjang : 13.70 meter dan lebar 1.70 meter, terowongan makin kedalam semakin mengecil dengan lebar 1 meter, di ujung lorong buntu mengingat dinding barat berada di bawah tanah/kebun jagung. Bagian atas bunker seluruhnya tertutup

tanah dan semak belukar, selain itu terdapat 2 pohon besar yang tumbuh dan menempel di kedua sudut dinding timur. Letak bunker yang berada di lereng bukit dengan kondisi tanah labil, adanya aktifitas masyarakat yang membuka lahan kebun di sekitar bunker dan Keberadaan pohon besar tersebut merupakan ancaman yang dapat mempercepat proses kerusakan pada bunker.



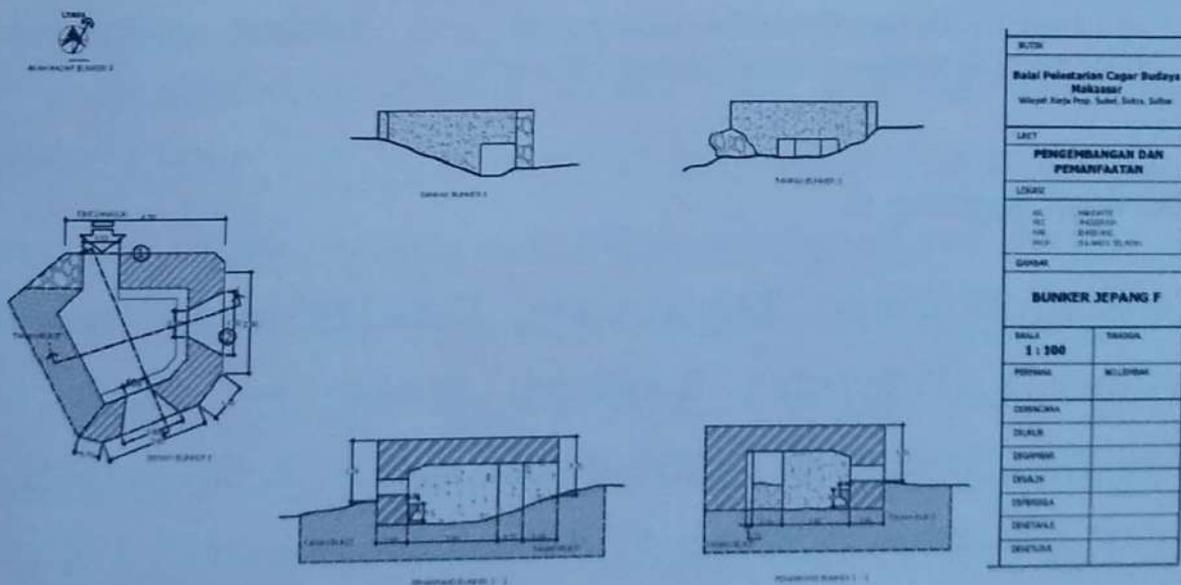
Foto 9. Kondisi Bunker Jepang E
(Dok.Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar, 2013)

Bunker Jepang F

Bunker Jepang ini terletak di Dusun Bambapuang, Desa Mendatte, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Lokasi bunker sangat mudah dijangkau dengan kendaraan roda dua maupun

roda empat melalui jalan desa (cor beton), selanjutnya berjalan kaki sejauh 100 meter ke arah utara dari bunker 2 tepatnya di tengah-tengah kebun pepaya dengan batas-batas : di sebelah utara berbatasan dengan kebun /jalan desa, di sebelah timur dengan semak belukar/jalan desa, di sebelah selatan dengan bunker 2/bunker 3 dan di sebelah barat dengan kebun/ jalan desa.

Secara geografis/ astronomis pada titik koordinat S 03° 27' 34.8" E 119° 47' 25.2" dengan ketinggian 593 meter di atas permukaan laut. Bunker berbentuk persegi empat berukuran



Gambar 6. Denah Bunker Jepang F

panjang : 3,6 meter, lebar : 2 meter dan tinggi : 2 meter dalam kondisi rusak parah terutama pada dinding utara dan bagian atas



Foto 10. Bunker F kondisi rusak parah
(Dok. Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar,
2013)

(hilang), pintu terletak di barat berukuran : tinggi 200 cm dan lebar 80 cm. Kerusakan terjadi akibat aktifitas masyarakat yang memanfaatkan batu-batu di sekitarnya.

- **Bunker Jepang G**

Terletak di Dusun Bambapuang, Desa Mendatte, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Bunker ini sangat mudah dijangkau, terletak di tengah-tengah kebun \pm 50 meter ke arah timur dari Bunker Jepang F, dengan batas-batas : di sebelah utara dengan lembah/jln.desa (beton), di sebelah timur dengan lembah/sungai Mata Allo, di sebelah selatan dengan kebun

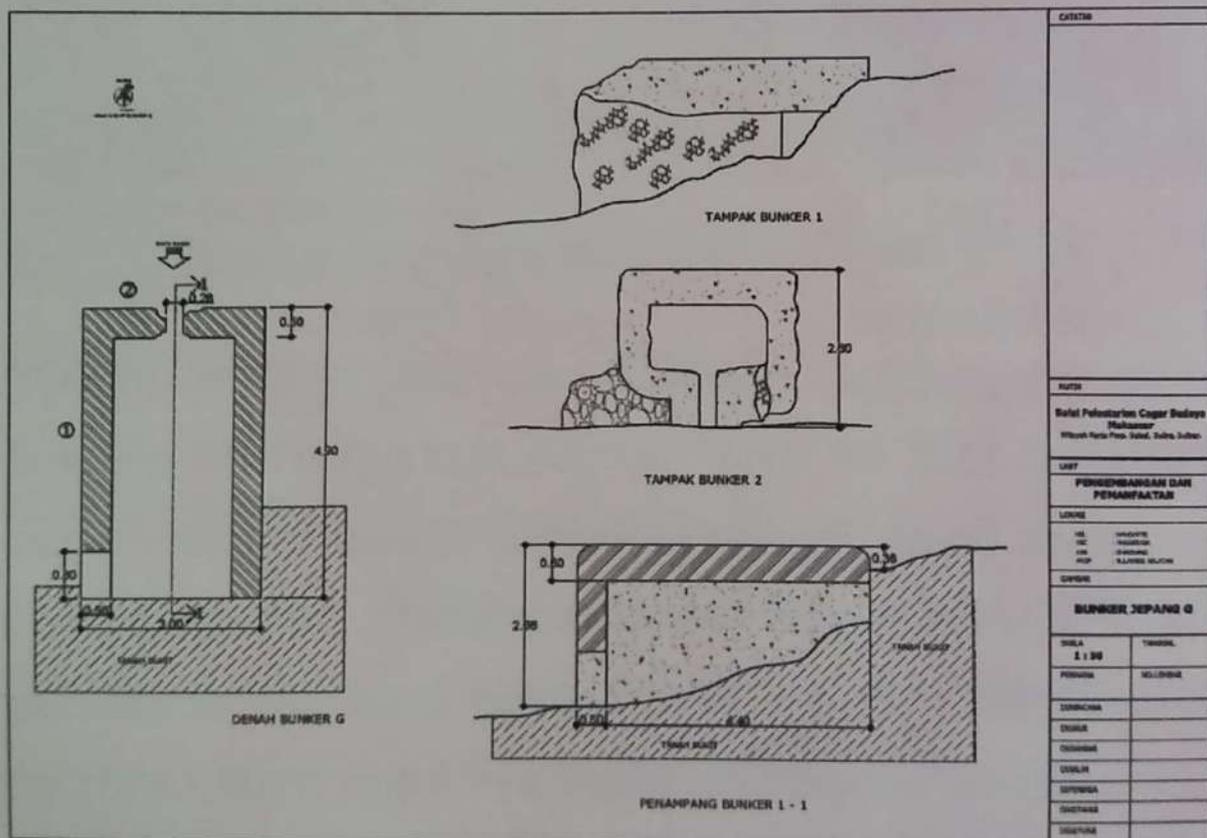
jagung/lembah dan di sebelah barat dengan kebun jagung/bunker Jepang F.



Foto 11. Bunker G (tampak utara dan tampak selatan)
(Dok. Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar, 2013)

Secara geografis/astronomis berada pada titik koordinat $S 03^{\circ} 27'35.6''$ $E 119^{\circ} 47' 24.1''$ dengan ketinggian 603 meter di atas permukaan tanah. Bunker berbentuk persegi empat dengan pintu berada di sebelah utara berukuran lebar : 100 cm, tinggi : 140 cm dan tebal : 52 cm. Pada dinding utara dan selatan terdapat jendela/lubang pengintaian berukuran lebar : 100 cm, tinggi : 56 cm dan tebal 52 cm, sedang 2 buah lubang kecil terletak di bagian atap bunker, adapun bunkernya sendiri berukuran : 3.33 m x 2.10 m dengan tinggi 180 cm.

Kondisi tanah di sekitar bunker sangat labil terutama pada sisi utara, timur dan selatan dengan kemiringan 45° , hal ini dikhawatirkan akan mengancam keberadaan bunker tersebut, selain itu ancaman juga dapat ditimbulkan dari adanya aktifitas masyarakat yang memanfaatkan batu-batu di sekitarnya.



Gambar 7. Denah Bunker Jepang G

- Bunker Jepang H



Foto 12. Bunker Jepang 2 (tampak selatan)
(Dok. Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar, 2013)

Bunker 2 berada pada titik koordinat S $03^{\circ} 27' 36.1''$ E $119^{\circ} 47' 24.7''$ dengan ketinggian 604 meter dari permukaan laut. Bunker ini berjarak ± 500 meter ke arah utara dari bunker 1,

melalui jalan desa (beton). Bunker dapat di jangkau dari jalan desa ± 25 meter ke arah selatan dan berada di tengah-tengah kebun jagung. Bunker berbentuk persegi empat (beton) berukuran 320 cm x 176 cm dengan tinggi 180 cm, pintu masuk di sebelah utara berukuran lebar 120 cm dan tinggi 43 cm (sebagian tertimbun tanah dan batu), selain itu terdapat jendela/lubang pengintaian 3 buah berukuran 46 cm x 25 cm

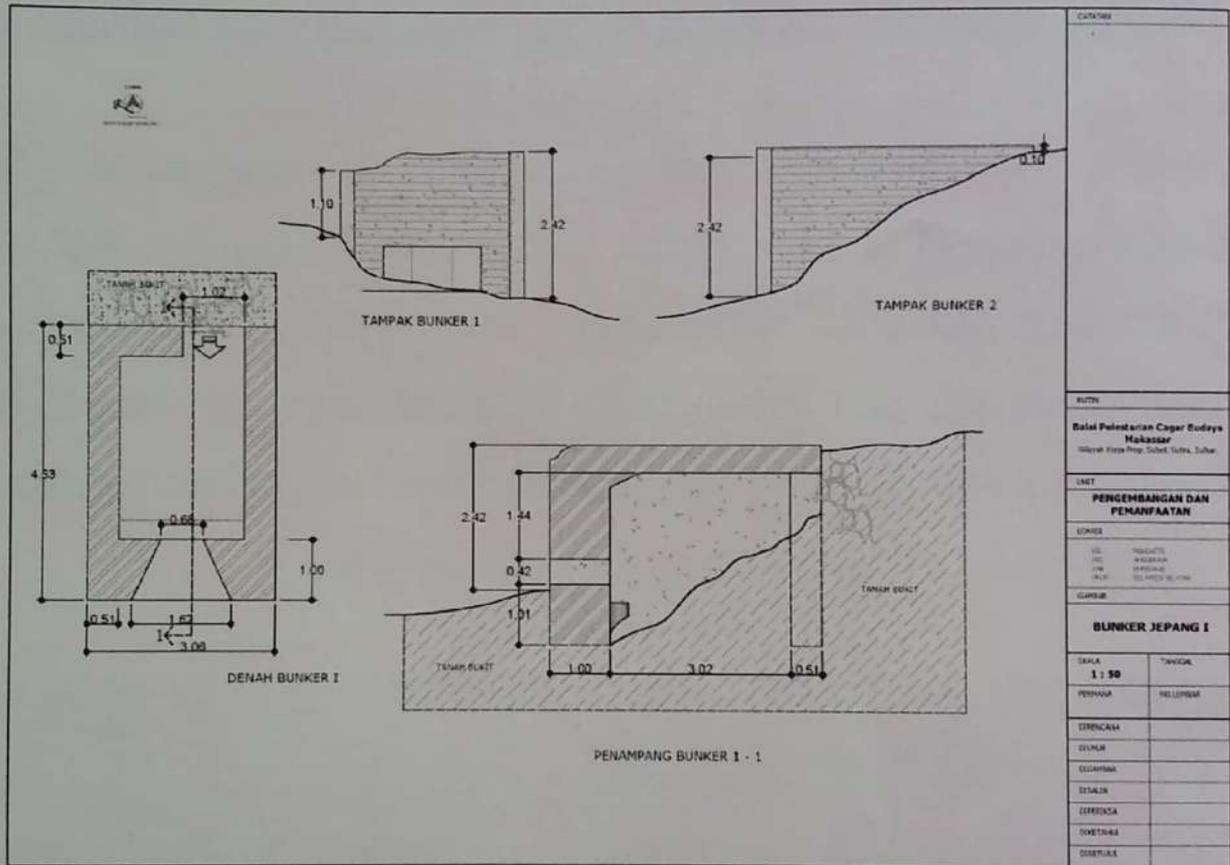
kondisi bunker dan mempercepat proses kerusakan pada bagian atas bunker. Bagian dalam bunker terdapat dinding penyekat (hilang) akibat pembongkaran yang dilakukan oleh masyarakat.

Secara Administratif bunker Jepang 2 terletak di Dusun Bambapuang, Desa Mendatte, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Adapun batas-batas situs yaitu : sebelah utara berbatasan dengan kebun/jalan desa (cor beton), sebelah timur dengan kebun/bunker 3, sebelah selatan kebun/jurang dan sebelah barat dengan kebun/rumah penduduk.



Foto 13. Kondisi dalam bunker dan bangunan yang menempel di dinding bunker 2.
(Dok. Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar, 2013)

- Bunker Jepang I



Gambar 9. Denah Bunker Jepang I

Bunker ini terletak di Dusun Bambapuang, Desa Mendatte, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, tepatnya pada titik koordinat $S 03^{\circ} 27' 41.5''$ dengan ketinggian 578 meter dari permukaan laut. Lokasi bunker dapat dijangkau dengan

kendaraan roda empat kurang lebih 2 Km ke arah utara dari Villa Bambapuang (Resting). Dari jalan poros \pm 20 meter ke arah timur menuruni lereng bukit, kondisi jalan licin dengan kemiringan tanah \pm 45° . Bunker berbatasan dengan semak belukar/pemukiman di sebelah utara, lembah/sungai Mata Allo di sebelah timur, kebun di sebelah selatan dan jalan poros Enrekang-Toraja di sebelah barat.



Foto 14. Kondisi bunker 1 (tampak tenggara)
(Dok. Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar, 2013)

Bentuk bunker secara keseluruhan tidak dapat dilihat dari luar mengingat sebagian besar badan bunker tertimbun tanah terutama pada dinding barat dan bagian atas bunker, untuk

melihat bentuk bunker dengan jelas maka pengamatan dilakukan dari dalam bunker. Bunker dalam kondisi utuh berbentuk persegi empat menggunakan bahan cor beton berukuran 330 cm x 330 cm (yang terlihat di permukaan) dengan tinggi 230 cm, pintu terletak di dinding barat (tertimbun tanah) berukuran tinggi 180 cm dan lebar 100 cm, lubang pengintaian/jendela 1 buah terletak di dinding timur berukuran 156 cm x 59 cm dengan ketebalan dinding 58 cm. Pada awalnya bunker difungsikan sebagai tempat pertahanan, saat ini sudah tidak difungsikan lagi bahkan terbengkalai.

PENUTUP

Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Jepang sangat mempengaruhi perjalanan kehidupan masyarakatnya, hal tersebut dapat dilihat dari tujuan Jepang yang menguasai Indonesia untuk kepentingan ekonomi dan politik. Seperti kita ketahui bahwa Jepang merupakan negara industri yang sangat maju dan besar. Dilihat dari segi ekonomi, Jepang sangat menginginkan bahan baku industri yang ada di Indonesia, selain itu Indonesia juga merupakan daerah pemasaran industri yang strategis bagi Jepang untuk menghadapi persaingan dengan tentara Sekutu. Bahkan dampaknya hingga saat ini masih dirasakan, karena Indonesia menjadi konsumen besar bagi Jepang.

Pendudukan Jepang di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Enrekang, setidaknya dapat membuktikan dua hal pokok yakni :

1. Penekanannya diprioritaskan pada pembangunan sarana pertahanan militer.
2. Pembangunan ekonomi Jepang pada masa itu, diusahakan untuk memenuhi kebutuhan perang atau angkatan perang.

Dengan demikian, aspek nilai penting historis yang dapat di petik dengan keberadaan Jepang di Kabupaten Enrekang, yakni :

1. Peninggalan pertahanan militer Jepang berupa Bunker, mewakili bukti suatu dinamika sejarah daerah Sulawesi Selatan, khususnya periode Pendudukan/Penjajahan Jepang.
2. Bunker Jepang sebagai bukti pertahanan militer Jepang, secara kognitif (kejiwaan) dapat dijadikan sebagai sarana untuk membangun jiwa nasionalisme generasi muda, membangun jiwa kebangsaan dan cinta tanah air, serta membangun jiwa patriotisme khususnya bagi para generasi muda seperti pelajar dan Mahasiswa. Bukti itu dapat dijadikan sebagai sarana membangun afektif (tingkah laku) yang nasionalis pada masyarakat dan rakyat bangsa Indonesia.
3. Nilai penting lain, selain nilai historis itu yakni letak lokasi situs Bunker yang sangat strategis sebagai kunjungan studi wisata, termasuk strategis bagi pengembangan dan pemanfaatan situs tersebut.

KEPUSTAKAAN

- Anonim. 1985. *Petunjuk Teknis Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala*. Jakarta : Direktorat Jenderal Kebudayaan, Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.
- . 2010. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- Harvey, Barbara Sillars. 1989. *Pemberontakan Kahar Muzakkar Dari Tradisi ke DI/TII*. Jakarta : Grafitti.
- Poelinggomang, Edward L. 2004. *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942*. Yogyakarta : Ombak.
- Sarrang, Silla. 1993. *Sejarah Pememrintahan di Wilayah Maiwa*. Enrekang : Panitia Ulang Tahun ke XXXIII Kabupaten Enrekang.
- Soejiti, Irawan, 1984. *Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jilid I*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Seminar Sejarah Regional Indonesia Timur. 1993. *Masalah Perjuangan Rakyat Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Suryaningrat, Bayu. *Sejarah Pemerintahan di Indonesia Babak Hindia Belanda dan Jepang*. Jakarta : Dewaruci Press.
- Rasyid, Darwas. 2004. *Pancaitanya BungawalaE*. Makassar : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.